

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah merupakan entitas pelapor yang ditugaskan untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam menyajikan laporan keuangan, pemerintah daerah harus menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan pengambilan keputusan.

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu entitas. Pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitas laporan keuangan antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang

berkualitas juga memiliki komponen-komponen yang harus ada dalam penyusunan laporan keuangan. Komponen laporan keuangannya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji. Masih banyaknya laporan keuangan pemerintah daerah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan ketentuan dan adanya penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK merupakan suatu badan yang diberikan tugas oleh negara untuk mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar mengetahui kualitas dari laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk bertanggungjawab dalam mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang ditugaskan untuk menyusun laporan keuangan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD dan berupaya untuk meningkatkan kualitas dari LKPD tersebut.

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan SDM yang berkompeten dan memahami prosedur penyusunan laporan keuangan yang benar. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan, agar tercipta laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang baik. Kompetensi SDM bisa dikatakan sebagai kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi dalam mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Kompetensi SDM membuat seseorang

harus memiliki kinerja yang maksimal dalam pekerjaannya, dan memiliki peranan yang sangat penting sebagai perencana, pelaksana dan pengatur suatu entitas.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ada hal yang mendasar dan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dan pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Penerapan sistem akuntansi ini berfungsi sebagai mekanisme, prosedur kerja, dan alat kontrol dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas suatu laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Manfaat dari penggunaan teknologi informasi, antara lain: mempercepat proses transaksi, perhitungan, penyimpanan dan lain

sebagainya. Penggunaan teknologi informasi sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan yang andal. Kurniawati, et al (2018) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Kualitas LKPD juga ditentukan oleh sistem pengendalian intern yang dimiliki setiap institusi dalam pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern menjadi hal utama dan sangat dibutuhkan, karena kegiatan operasional memerlukan kebijakan yang mampu mengatur dan memberikan ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Pengendalian intern dalam laporan keuangan juga berfungsi untuk mengecek ketelitian dan keandalan datanya. Dengan sistem pengendalian intern yang baik, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan dapat diminimalisir sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah melakukan kesalahan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mokoginta, et al (2017). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada tempat objek penelitiannya. Penelitian Mokoginta, et al dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sedangkan penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan. Perbedaan lainnya adalah menambahkan dua variabel

independen yaitu kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan uraian tersebut penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan lebih memahami terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji masalah yang sama di masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Suatu karya ilmiah membutuhkan sistematika dalam penulisan yang baik, teratur dan terperinci. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini membahas tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi landasan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

Bab III merupakan metode penelitian. Bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

Bab IV merupakan analisis data dan pembahasan. Bab ini membahas tentang analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan penutup. Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.